

**FAKTOR-FAKTOR FEDERASI RUSIA TIDAK MENGIMPLEMENTASIKAN  
CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF  
DISCRIMINATION AGAINST WOMEN(CEDAW) DALAM MENGATASI  
KEKERASAN RUMAH TANGGA2010-2016**

**Oleh: Elsa Riana**

*elsariana83@gmail.com*

**Pembimbing: Dr. Pazli, M.Si**

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

***Abstract***

*Violence against women has now become a serious threat and is part of human rights violations. The Convention on the elimination of all forms of discrimination against Women (CEDAW) is one of the international conventions under the United Nations concerning the elimination of all forms of discrimination against women both in the social, political, economic and cultural fields. Russia is one of the parties to the CEDAW convention, which prohibits violence against women both in the public and private spheres and establishes such violence as a form of discrimination. But based on the fact that domestic violence is one of the most frequent discrimination against women in the Russian Federation, it causes Russian women to die and experience severe trauma. In this study the author uses the theory of Radical Feminism. according to Kate Millet through his theory, "sexual politics" (sexual politics) shows how the position of men is more dominant than women in patriarchal society. Sexual politics is defined as the politicization of power based on gender or gender. The hegemony of masculinity and the subordination of femininity are illustrated through inequality in the distribution of character, role, and status between feminine and masculine. The Government of the Russian Federation is less responsive in dealing with violence or discrimination faced by women in the household. This is influenced by patriarchal cultural factors that are still deeply rooted since the Empire until the current federation. In the legal regulations the Russian government itself does not bind strong rules against perpetrators of domestic discrimination, the Government's legal rules do not work in accordance with the CEDAW convention and the government does not maintain data on cases of female violence that occur in Russia.*

***Keywords: Domestic Violence, Women, Russian Federation, CEDAW, Human Rights.***

## Pendahuluan

Pembahasan tentang hak asasi perempuan sebagai perwujudan dari Hak Asasi Manusia (HAM) semakin menguat dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan oleh banyaknya perempuan yang menjadi korban kekerasan. Salah satu bentuk pelanggaran hak asasi perempuan yang paling sering terjadi yaitu, menolak kesetaraan terhadap perempuan, keamanan, martabat, harga diri, dan hak mereka untuk menikmati kebebasan mendasar, yang berakhir dengan membunuh, menyiksa dan melumpuhkan baik secara fisik, psikologis, seksual dan ekonomi.<sup>1</sup>

Tindak kekerasan terhadap perempuan (*violence against women*) saat ini menjadi ancaman serius bagi perempuan di seluruh dunia yang merupakan bagian dari pelanggaran Hak Asasi Manusia. Kekerasan pada perempuan menurut pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.<sup>2</sup>

Isu mengenai ketimpangan hak terhadap perempuan telah direspon oleh dunia Internasional melalui CEDAW.<sup>3</sup> CEDAW diakui sebagai

aturan yang diharapkan mampu melindungi perempuan dari tindakan kekerasan dan sikap keberpihakan pada jenis kelamin tertentu. CEDAW juga diyakini sebagai payung hukum yang berupaya menghapus diskriminasi terhadap perempuan yang berawal dari pemahaman sepihak mengenai hak dan kewajiban sebagai manusia yang pada hakikatnya diciptakan sama oleh Tuhan.

Awal tahun 1970-an PBB membentuk *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women* (CEDAW). Konvensi yang diadopsi oleh PBB ini dibentuk pada 18 Desember 1979 dan memiliki kekuatan hukum sejak 3 September 1981.<sup>4</sup> Telah diratifikasi oleh 187 negara dan ditandatangani oleh 99 negara sampai dengan tahun 2014.

Dalam meratifikasi CEDAW, Negara-negara Pihak berkomitmen tidak hanya membangun keseimbangan hukum formal antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga untuk

---

jenis kelamin. *Kedua*, fenomena *gender* dianggap sebagai suatu kajian yang tidak *on going*. Banyak masyarakat menganggap masalah *gender* adalah masalah “*di sana*” bukan “*di sini*” padahal masalah *gender* ada disekitar kita. *Ketiga*, rendahnya minat terhadap persoalan *gender* (*aservitas*) sehingga perempuan umumnya merasa kurang mampu menyuarakan problemnya, baik kepada sesama perempuan maupun kepada laki-laki. Maka, mutlak diperlukan perjuangan dalam melawan ketidakadilan *gender*, yang membuat perempuan mampu mendialogkan pendapat dengan *self evidence* (percaya diri), lihat lebih lanjut dalam Marwah Daud Ibrahim, *Teknologi dan Emansipasi*, (Bandung: Mizan, 1984), hlm. 134.

<sup>4</sup>Division for the advancement of women. “convention on the elimination of all forms of discrimination against women” the working paper of ECOSOC (2004). <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.html> (diakses pada 28 april 2018)

---

<sup>1</sup>*Al-Ah}wa>l*, Vol. 9, No. 2, Desember 2016 M/1438 H

<sup>2</sup>Definisi Kekerasan terhadap Perempuan [http://www.k4healt.org/sites/default/files/CEDAW\\_document.pdf](http://www.k4healt.org/sites/default/files/CEDAW_document.pdf) diakses pada 18 Mei 2018.

<sup>3</sup>Kesalahpahaman tersebut paling tidak dipengaruhi beberapa hal: *Pertama*, istilah *gender* tergolong bahasa asing. Kata “*gender*” tidak muncul dalam kamus Bahasa Indonesia, namun dari kosakata Inggris yang berarti

memastikan adanya tindakan nyata atas dasar kesetaraan terhadap hak-hak perempuan dengan laki-laki. Negara yang telah meratifikasi konvensi sudah menjadi kewajibannya melindungi perempuan dari diskriminasi atas dasar budaya.

Pemerintah Federasi Rusia dalam pemenuhan kewajibannya harus menjadikan CEDAW sebagai acuan dalam perlindungan Hak Asasi Perempuan (HAP), dalam pasal 2F dan 5A dijelaskan berikut kewajiban yang harus dilakukan dalam pemenuhan peratifikasian konvensi CEDAW.<sup>5</sup>

Pasal 2 (F) Konvensi CEDAW:

*Negara-negara peserta mengutuk diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya dan bersepakat untuk menjalankan dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda, kebijaksanaan menghapus diskriminasi terhadap perempuan, dan untuk tujuan ini berusaha: Membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang, untuk mengubah dan menghapuskan undang-undang, peraturan-peraturan, kebiasaan-kebiasaan dan praktek-praktek diskriminatif terhadap perempuan.*

Pasal 5 (A) Konvensi CEDAW:

*Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk mengubah pola tingkah laku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka-prasangka, kebiasaan-kebiasaan, dan segala praktek lainnya berdasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau berdasarkan*

<sup>5</sup>Konvensi CEDAW dalam [www.unwomen-eseasia.org/.../Cedaw/docs/KonvensiCEDAWte xtBahasa.pdf](http://www.unwomen-eseasia.org/.../Cedaw/docs/KonvensiCEDAWte xtBahasa.pdf) di akses pada 15 Mei 2018

*peranan stereotip bagi laki-laki dan perempuan.*

Pasal 2F Secara gamblang disebutkan bahwa negara yang telah meratifikasi konvensi CEDAW wajib membuat peraturan-peraturan tentang perlindungan terhadap perempuan dari tindakan diskriminasi seperti kekerasan dalam rumah tangga sebagai wujud pembuktian terlaksananya konvensi ini, maka pemerintah Federasi Rusia berkewajiban untuk memasukkan ketentuan yang berlaku kedalam perundang-undangannya. Namun sampai saat ini pemerintah Federasi Rusia tidak membuat perundangan yang tegas terhadap permasalahan kekerasan domestik yang terjadi pada perempuan.

Rusia adalah satu dari tiga negara yang berada di Eropa dan Asia Tengah yang belum memberlakukan hukum secara tetap terhadap kekerasan domestik.<sup>6</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Federasi Rusia berisi sejumlah ketentuan yang menetapkan hukuman terhadap pelaku kriminal tergantung pada tingkat keparahan dan kerugian yang di terima korban.<sup>7</sup> Namun, Kode Etik pasal 116

<sup>6</sup>*The Duma's War on Women: Why Russia Is About to Decriminalize Wife-Beating*, THE ECONOMIST (Jan. 28, 2017), <http://www.economist.com/news/europe/21715726-it-fits-traditional-values-lawmakers-say-why-russia-about-decriminalise-wife-beating>.

<sup>7</sup>Ugolovnyi Kodeks Rossiskoi Federatsii [Criminal Code of the Russian Federation] arts. 111–115, Law No. 63-FZ, June 13, 1996, SOBRANIE ZAKONODATELSTVA ROSSIISKOI FEDERATSII [SZRF] 1996, No. 25, Item 2954, <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102041891&intelsearch=%F3%E3%EE%EB%E%E2%ED%FB%E9+%EA%EE%E4%E5%E A%F1> (In Russian),

tampaknya menjadi satu-satunya ketentuan hukum yang berlaku untuk penuntutan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>8</sup>Pasal 116 berisi tentang pemukulan atau tindakan kekerasan serupa yang menyebabkan rasa sakit fisik tetapi tidak perlu penanganan serius dan tidak menghilangkan kapasitas umum seseorang untuk tetap bekerja.

Kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga bukanlah suatu fenomena yang baru di Rusia.Saat ini, beberapa orang mengklaim bahwa dasar bentuk kekerasan ini terjadi pada abad ke-16, dimana terdapat aturan/panduan tertulis tentang bagaimana mendisiplinkan keluarga dan pelayan.Praktek hukum dan kode perilaku yang ada di masyarakat menegaskan hak suami untuk memukul istri mereka.Pada abad ke-19, sejumlah penulis mengemukakan kekhawatiran tentang dampak kekerasan dalam keluarga terhadap kehidupan wanita di Kekaisaran Rusia.<sup>9</sup>

***“Violence against women is a manifestation of historically unequal power relations between men and women, which have led to domination over and discrimination against women by men and to the prevention of the full advancement of women...”***

The United Nations Declaration on the Elimination of Violence against Women, General Assembly Resolution, December 1993.<sup>10</sup>

---

<http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/ru/ru080en.pdf> (English Translation).diakses pada 18 Mei 2018.

<sup>8</sup>Pasal 116

<sup>9</sup><https://www.amnesty.org/download/.../eur460562005en.pdf>

<sup>10</sup>United Nations ECOSOC, Report of the Special Rapporteur on Violence Against Women, E/CN.4/1996/53.

Perubahan sistem pemerintahan dari kekaisaran, Uni Soviet, dan federasi sedikit banyak juga berpengaruh terhadap peran dan status perempuan.Pada masa kekaisaran Vladimir I mengadopsi Kristen Ortodoks tahun 988 M membawa beberapa perubahan pada tatanan masyarakat saat itu yang sebelumnya menganut paganisme, dimana perempuan memiliki derajat yang lebih tinggi dimasyarakat.<sup>11</sup>Sejak masuknya Kristen Ortodoks, masyarakat Rusia mulai menganggap bahwa perempuan adalah mahluk inferior yang derajatnya di bawah laki-laki.Perempuan dianggap tidak pantas berada di ruang publik.Perempuan lebih baik berada di ruang domestik dan mengikuti semua perintah suami agar menjadi perempuan ideal seperti Maria.<sup>12</sup>

Pada masa Uni Soviet Revolusi Bolshevik 1917 memberikan perubahan tak hanya dalam perubahan ideologi, namun juga berpengaruh dalam perubahan kehidupan perempuan saat itu. Jika dulu perempuan hanya bisa berada di ranah domestik, pada masa Uni Soviet perempuan dapat memasuki ranah publik sama seperti yang didapat laki-laki. Revolusi membuat perempuan bebas, perempuan dapat bergabung dalam partai politik dan serikat buruh.<sup>13</sup>Pasca keruntuhan Uni Soviet di tahun 1989, Uni Soviet berubah menjadi Federasi Rusia.Pada masa transisi dari Uni Soviet menuju Federasi Rusia banyak terjadi perubahan, seperti banyaknya perempuan Rusia yang

---

<sup>11</sup>Trepanier, Lee. 2010. *Political Symbols in Russian History*. Lexington Book. Hal.11

<sup>12</sup>Hubbs, Joanna. 1993. *Mother Russia: The Feminine Myth in Russia Culture*. USA: Indiana University Press. hal. 93

<sup>13</sup>Clements, Ronald.E. 1991. *The World of Ancient Israel*. Cambridge University Press.hal. 193

kehilangan pekerjaan.<sup>14</sup> Dampak lain dari masa transisi ini adalah meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan berdasarkan beberapa hasil survey.

Menurut Kementerian Dalam Negeri Rusia (Polisi), 40% kejahatan dan tindak kekerasan terjadi di dalam keluarga.<sup>15</sup> BBC melaporkan bahwa 600.000 wanita di Rusia setiap tahun menghadapi kekerasan rumah tangga fisik dan verbal menurut perkiraan, berdasarkan studi di beberapa daerah yang dipilih yang dilakukan oleh kementerian dalam negeri Rusia.<sup>16</sup> Alasan untuk kejahatan domestik bervariasi, bagi keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah ialah masalah pendapatan, sementara keluarga dengan ekonomi menengah ke atas kejahatan domestik terjadi karena kecemburuan dan perebutan harta. Sementara itu pengangguran yang tinggi membuat orang frustrasi dan menyebabkan penyalahgunaan alkohol yang berujung pada kekerasan domestik.

Setiap jam seorang perempuan di Rusia meninggal di tangan kerabat, pasangan atau mantan pasangannya. Kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga terjadi hampir di seluruh 89 wilayah federasi Rusia. Hal ini terjadi dalam keluarga dengan lingkup sosial dan latar belakang etnis yang berbeda, dan ini bukanlah masalah pribadi tetapi mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Pada tahun 2010 tercatat 14.000 perempuan Rusia meninggal dunia akibat kekerasan dalam rumah

tangga.<sup>17</sup> *Moscow's Anna National Center for the Prevention of Violence* melaporkan bahwa pada tahun 2012 sepertiga dari perempuan di Rusia menderita karena kekerasan dalam rumah tangga.<sup>18</sup>

*In most cases, police say this is a family matter. If a woman is beaten and calls the police, they ask who is beating her. If she says her husband, the police tell her it's a private affair. Now that crime is increasing, police say they don't have time for family matters.*

-- Natalia Rimashevskaya, director of the Institute for Socio-Economic Population Studies<sup>19</sup>

Banyak wanita yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga selama bertahun-tahun tetapi seringkali permasalahan ini dianggap sebagai masalah internal atau domestik bukan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pemerintah menganggap kekerasan dalam rumah tangga adalah bagian dari kehidupan setiap keluarga di Rusia.<sup>20</sup> Selain itu, polisi jarang menanggapi pengaduan kekerasan dalam rumah tangga dengan serius. Jika mereka menangkap pelaku, dia sering dibebaskan dengan cepat dan ketika kembali ke rumah pelaku bahkan lebih kejam dari sebelumnya. Pejabat lokal seringkali tidak memiliki pengalaman dalam melindungi korban dari kekerasan lebih lanjut dan dengan

<sup>17</sup><http://en.rin.ru/russia/20100527/159178795.html> diakses pada 15 may 2018

<sup>18</sup><http://en.rin.ru/russia/20120502/173175418.html> diakses pada 15 may 2018

<sup>19</sup>Interview, Natalia Rimashevskaya, director of the Institute for Socio-Economic Population Studies at the Russian Academy of Sciences, Moscow, March 14, 1994. The Institute houses the Moscow Gender Studies Center and Moscow's first hotline for victims of domestic violence.

<sup>20</sup><http://www.globalaffairs.org/threads/violence-against-women-in-russia.9192/> diakses pada 23 Oktober 2018

<sup>14</sup>Clements, Ronald.E. 2012. *Old Testament Theology: A Fresh Approach*. Eugene, OR: Wipf & Stock Pub. hal. 287

<sup>15</sup>*The Duma's War on Women*, supra note 1

<sup>16</sup><https://www.bbc.com/news/world-europe-21474931> diakses pada 23 oktober 2018

demikian, ketakutan akan kekerasan lebih lanjut adalah ancaman nyata bagi perempuan yang mengajukan pengaduan.<sup>21</sup>

Rusia adalah pihak pada Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), yang melarang kekerasan terhadap perempuan, baik secara publik maupun pribadi, dan menetapkan kekerasan semacam itu sebagai bentuk diskriminasi.

Saat ini Konstitusi dari Federasi Rusia memberikan hak yang sama untuk pria dan wanita di Pasal 17 dan 19, tapi prinsip non-diskriminasi tidak berlaku di semua area. Federasi Rusia meratifikasi konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan pada tahun 1988, tetapi belum mengesahkan protokol opsional pada kekerasan terhadap perempuan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai faktor-faktor penyebab Rusia tidak mengimplementasikan *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women*(CEDAW) dalam Mengatasi Kekerasan Rumah Tangga.

*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) merupakan salah satu konvensi mengenai penghapusan diskriminasi perempuan baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya. konvensi ini dirumuskan sebagai salah satu bentuk keprihatinan PBB mengenai isu diskriminasi terhadap perempuan yang terus berkembang sampai saat ini.

Rusia adalah salah satu pihak dalam Konvensi Penghapusan Semua

Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), yang melarang kekerasan terhadap perempuan baik dalam ranah publik atau secara pribadi, dan menetapkan kekerasan seperti itu sebagai bentuk diskriminasi. Tetapi pada faktanya kekerasan domestik atau kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu bentuk diskriminasi yang sering terjadi terhadap perempuan di Federasi Rusia. Kekerasan ini telah menyebabkan perempuan Rusia meninggal dan mengalami trauma berat.

Melihat tingginya tingkat kekerasan yang dialami oleh perempuan Rusia, Konvensi Internasional CEDAW mengkritik Federasi Rusia sebagai bagian dari konvensi tersebut, karena tidak adanya perundang-undangan yang kuat untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga.<sup>22</sup> Berdasarkan fenomena yang ada, peneliti merumuskan suatu permasalahan penelitian sebagai berikut: ***“Apa Faktor-Faktor Dominan Yang Menyebabkan Rusia Tidak Mengimplementasikan Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (CEDAW) Dalam Mengatasi Kekerasan Perempuan Dalam Rumah Tangga 2010-2016?”***

#### **Tujuan Penelitian:**

1. Memaparkan gambaran umum mengenai negara

---

<sup>22</sup>CEDAW, Concluding Observations on the Eighth Periodic Report of the Russian Federation, U.N. Doc.CEDAW/CO/RUS/8, available at [http://www.hr-dp.org/files/2016/08/04/Committee\\_on\\_the\\_Elimination\\_of\\_Discrimination\\_against\\_Women,\\_Concluding\\_Observations\\_on\\_the\\_Eighth\\_Periodic\\_Report\\_of\\_the\\_Russian\\_Federation.pdf](http://www.hr-dp.org/files/2016/08/04/Committee_on_the_Elimination_of_Discrimination_against_Women,_Concluding_Observations_on_the_Eighth_Periodic_Report_of_the_Russian_Federation.pdf), diakses pada 15 Mei 2018,

---

<sup>21</sup>Interview with Yaroslavna, October 24, 2003, Moscow, Russia.

- Federasi Rusia dan konvensi internasional CEDAW.
2. Memaparkan masalah mengenai kekerasan terhadap perempuan di Rusia.
  3. Menemukan faktor-faktor dominan penyebab Federasi Rusia tidak mengimplementasikan CEDAW dalam menangani kekerasan rumah tangga terhadap perempuan.

**Manfaat:** Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ataupun referensi kepada pembaca, khususnya mahasiswa Hubungan Internasional yang tertarik dengan masalah-masalah mengenai isu-isu dalam gender termasuk isu-isu kekerasan yang terjadi pada perempuan.

### **Kerangka Teori**

Perspektif yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu perspektif Feminisme, *Maggie Humm* menjelaskan feminisme sebagai sebuah ideologi pembebasan perempuan karena yang melekat dalam semua pendekatannya adalah keyakinan bahwa perempuan mengalami ketidakadilan karena jenis kelaminnya, karena ia adalah perempuan.<sup>23</sup> Feminisme sebagai pendekatan mengenai perempuan akan lebih bisa menggambarkan hal-hal mengenai diri perempuan, segala sesuatu yang dialami oleh perempuan seperti halnya tindak kekerasan yang dialami langsung oleh perempuan-perempuan di Rusia.

Menurut Simone de Beauvoir, seorang feminis Perancis dalam bukunya yang berjudul *The Second Sex*,

dikatakan betapa begitu jelasnya diskriminasi terhadap perempuan dalam stereotip yang membedakan perempuan dan laki-laki dan mempertanyakan “*what is a woman?*”.<sup>24</sup>

Dalam buku tersebut dapat disimpulkan bahwa perempuan sebagai inferior dan laki-laki sebagai superior. Hal ini yang menyebabkan perempuan sering mendapat tindak kekerasan yang melanggar Hak Asasi Perempuan. Oleh karena itu CEDAW sebagai salah satu konvensi yang memperjuangkan hak wanita perlu dilakukan pengimplementasiannya dengan baik oleh negara-negara peratifikasi agar tidak ada lagi diskriminasi seperti tindak kekerasan yang dialami perempuan-perempuan di Rusia.

Penulis melakukan analisis menggunakan Tingkat Analisa Negara-Bangsa. Negara diartikan sebagai integrasi kekuatan politik, organisasi kekuasaan, alat dari yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia didalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan didalam masyarakat.

Teori yang penulis gunakan adalah Feminisme Radikal. Kate Millet melalui teorinya, “*sexual politics*” (politik seksual) menunjukkan bagaimana posisi kaum laki-laki lebih dominan dibandingkan dengan perempuan dalam masyarakat patriarkial. Kata ‘politik’ mengacu pada hubungan kekuasaan terstruktur yang menunjukkan suatu kelompok mengontrol kelompok lain, sedangkan ‘seksual’ merujuk pada penunjukkansupremasi kaum (yang berjenis kelamin) laki-laki terhadap perempuan, keluarga, dan

<sup>23</sup>Maggie Humm. 2002. *Ensiklopedia Feminisme*, Yogyakarta, Fajar Pustaka Baru. hal. 177

<sup>24</sup>Simone de Beauvoir. 1989. *The Second Sex*. New York:Vintage

masyarakat.<sup>25</sup> Sehingga, “sexual politics” dimaknai sebagaipolitisasi kekuasaan dengan berdasarkan jenis kelamin/gender.

### Metode Penelitian

Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif artinya penulis berusaha menampilkan beberapa fakta yang terjadi dari beberapa sumber yang melalui data yang didapatkan.

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan studi kepustakaan ( *library research* ), dengan cara mengumpulkan bahan dari berbagai sumber, seperti: buku, internet, majalah, jurnal, dan koran. Jenis data yang penulis gunakan yaitu jenis sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dan diolah oleh penulis pertamanya dari berbagai literatur baik berupa buku, jurnal, dokumen, majalah, surat kabar, internet, maupun buletin yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

### Pembahasan

Pada masa kekaisaran Vladimir I mengadopsi Kristen Ortodoks tahun 988 M membawa beberapa perubahan pada tatanan masyarakat saat itu. Sejak masuknya Kristen Ortodoks, masyarakat Rusia mulai menganggap bahwa perempuan adalah makhluk inferior yang derajatnya di bawah laki-laki. Perempuan dianggap tidak pantas berada di ruang publik. Perempuan lebih baik berada di ruang domestik dan mengikuti semua perintah suami agar menjadi perempuan ideal seperti Maria.<sup>26</sup> Pada abad ke-16 disahkannya

UU *Domostroi* yang dibuat oleh gereja. UU *Domostroi* ini berisi aturan ketaatan pihak yang superior (seperti Tsar, Pangeran, Boyar, Suami, Orangtua, Tuan dan Pendeta) untuk menjadi masyarakat yang baik.<sup>27</sup> Kitab *Domostroi* pada masa kekaisaran merupakan pedoman hidup masyarakat Rusia saat itu yang menggambarkan relasi patriarkal, melegalkan pemukulan yang dilakukan oleh suami terhadap istri.

Menurut Kementerian Dalam Negeri Rusia pada tahun 2013 tercatat 36.000 perempuan mengalami pemukulan setiap harinya. Sebanyak 12.000 perempuan meninggal akibat kekerasan dalam rumah tangga setiap tahunnya, setiap 40 menit satu perempuan meninggal dunia karena kekerasan dalam rumah tangga.

Patriarki di Federasi Rusia membuat masalah kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah privat sehingga tidak pantas jika dibawa ke ruang publik, hal ini terlihat dari hasil survey pada tahun 2002 sebanyak 43% responden menyatakan bahwa pemukulan istri oleh suami adalah masalah pribadi yang tidak bisa dicampuri oleh siapapun.<sup>28</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah endemik di Rusia. Angka resmi dari Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa kekerasan terjadi secara teratur di sekitar satu dari empat keluarga Rusia. Outlet media yang dikelola pemerintah melaporkan bahwa empat puluh persen

<sup>25</sup>Millet, Kate. 1970. “*Sexual Politics*”. Garden City N.Y: Doubleday. hal. 23

<sup>26</sup>Hubbs, Joanna. 1993. *Mother Russia: The Feminine Myth in Russia Culture*. USA: Indiana University Press. hal. 93

<sup>27</sup>Pouncy, Carolyn. 1994. *The “Domostroi” Rules for Russian Households in the Time of Ivan the Terrible*. Cornell University Press. Hal. 20

<sup>28</sup>ANNA National Center for the Preventing of Violence 2010

dari semua kejahatan kekerasan di negara itu terjadi dalam lingkungan keluarga, seperti halnya lebih dari sepertiga dari semua kasus pembunuhan. Sementara itu, organisasi pengawas hak asasi manusia menggambarkan kekhawatiran yang sama.<sup>29</sup>

Menurut penilaian 2008 oleh Kementerian Dalam Negeri, penilaian terbaru yang tersedia, hingga 40 persen dari semua kejahatan berat di Rusia dilakukan dalam keluarga, dan sebuah studi independen yang dikutip secara luas, yang diterbitkan pada 2007, mengungkapkan bahwa perempuan di Rusia tiga kali lebih mungkin mengalami kekerasan dalam keluarga daripada dari orang asing.<sup>30</sup>

Meskipun beberapa badan negara Rusia menyimpan beberapa data tentang kekerasan di dalam keluarga, pemerintah tidak secara sistematis mengumpulkan informasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, dan statistik resmi masih langka, terpisah-pisah, dan tidak jelas. Kurangnya undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga atau definisi hukum dari kekerasan dalam rumah tangga menyebabkan tidak adanya statistik khusus.

Pada Januari-Juni 2016 pasal 116 KUHP berlaku dimana pelaku kekerasan akan dihukum hingga 2 tahun penjara. Namun setelah UU didekriminalisasi artikel 6.1.1 dari kode

administratif berlaku maka pelaku kekerasan didenda hingga 30 ribu rubel, pelayanan masyarakat hingga 120 jam atau penangkapan administratif hingga 15 hari. Pada tahun 2016 setiap kekerasan yang memenuhi syarat akan dihukum sesuai pasal 116 KUHP Rusia dan apabila pelaku kekerasan bukan kerabat korban akan dihukum dibawah artikel 6.1.1 dari kode administrasi setelah UU didekriminalisasi tahun 2017 berlaku artikel 6.1.1 untuk pelaku kerabat korban.

Komite CEDAW, badan pakar PBB yang memantau kepatuhan terhadap CEDAW, telah menekankan dalam Rekomendasi Umum No. 19. Rekomendasi Umum No. 19 dari CEDAW membuat jelas bahwa “definisi diskriminasi” dalam Pasal I “termasuk kekerasan berbasis gender” —yaitu, “kekerasan diarahkan terhadap seorang wanita karena dia seorang wanita atau yang mempengaruhi wanita secara tidak proporsional.” Dengan demikian, Negara-negara Pihak secara hukum wajib tidak hanya menahan diri dari mendiskriminasi perempuan berdasarkan gender, tetapi juga untuk mengadopsi perlindungan afirmatif bagi korban kekerasan berbasis gender; ini merupakan pelanggaran terhadap Konvensi memungkinkan tindakan diskriminasi terhadap perempuan terus berlanjut.

Dalam ulasannya di Rusia tahun 2015, Komite CEDAW menyatakan keprihatinan atas “tingginya prevalensi kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan domestik dan seksual dan kurangnya statistik yang dipilah berdasarkan usia, kebangsaan, dan hubungan antara korban dan pelaku dan dari studi tentang penyebab dan konsekuensinya”. Rusia diminta untuk memberikan tindak lanjut terhadap laporannya pada tahun 2015

<sup>29</sup>Christina Misner-Pollard. 2009. “*Domestic Violence in Russia: Is Current Law Meeting the Needs of Victims and the Obligations of Human Rights Instruments?*”. 3 COLUM. J. E. EUR. Hal. 145

<sup>30</sup>Хроники тишины: насилие в отношении женщин в России’ под редакцией Марины Пискаловой-Паркер и Андрея Синельникова], p. 18. Moscow, 2016.

menanggapi kekhawatiran komite pada 20 November 2017. Laporan lengkap Rusia berikutnya kepada komite tersebut diharapkan pada November 2019.

### **Kesimpulan**

Korban kekerasan dalam rumah tangga di Rusia menghadapi beberapa hambatan terhadap keadilan. Ini termasuk tidak adanya respon umum dari kepolisian terhadap pengaduan kekerasan dalam rumah tangga, ketergantungan sistem hukum pada penuntutan pribadi untuk membawa kasus-kasus ini ke pengadilan, dan dengan dekriminialisasi UU baru-baru ini atas pelanggaran kekerasan dalam rumah tangga pertama yang tidak menyebabkan cedera tubuh yang serius.

1. Sudah menjadi hal umum bagi para korban kekerasan rumah tangga bahwa polisi tidak menanggapi kasus yang mereka hadapi. Meskipun ketika polisi menanggapi kasus tersebut maka proses berjalannya akan sangat lambat seperti penolakan untuk menulis laporan atas insiden tersebut, terkadang polisi menyalahkan atau menuduhnya telah mengarang tuduhan.
2. Kekerasan terhadap perempuan masih dianggap sebagai masalah “interpersonal” daripada masalah sosial, sebagian besar pengaduan kekerasan dalam rumah tangga diajukan sebagai penuntutan pribadi bukan sebagai kasus kriminal. Hal ini berarti korban harus mengumpulkan dan menyimpan semua bukti, mengajukan semua bukti ke pengadilan, dan terus mengejar kasusnya sendiri dan seringkali menghadapi apatisme polisi atau cemoohan langsung. Dan seringkali korban dalam melakukan ini sambil terus hidup

bersama pelaku, karena tidak ada perintah penahanan dalam sistem hukum Rusia.

3. Rusia adalah salah satu dari tiga negara di Eropa dan Asia Tengah yang tidak mengakui kekerasan dalam rumah tangga sebagai suatu pelanggaran serta, data statis tentang kejahatan kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan adalah terpisah dan sulit diperoleh.

Tingginya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan pada masa Federasi Rusia adalah dampak dari kuatnya budaya patriarki dalam paradigmamasyarakat Federasi Rusia. Kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan mulai terjadi sejak masa kekaisaran Rusia, saat *Domostroi* melegalkan pemukul yang dilakukan oleh suami terhadap istri sebagai bentuk pengajaran.

Walaupun pemerintah Federasi Rusia berusaha memberi jaminan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang telah diatur dalam *Конституция Российской Федерации* (Konstitusi Federasi Rusia) dan *Семейный кодекс Российской Федерации 1995* (Kode Keluarga 1995) namun di dalam kehidupan nyata belum sepenuhnya diimplementasikan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Jurnal :

- Article in Rural Sociology · September 2014. *The Underrepresentation of Women in Leadership Positions in Rural Russia*.pdf
- Al-Ahwal. Vol. 9, No. 2, Desember 2016. Hak-Hak Perempuan dalam Pengarusutamaan Ratifikasi *Cedaw* dan *Maqāṣid Asy-Syarī‘Ah*.
- Innocent Digest. *Domestic Violence Against Women and Girls*. No.1, June 2006.

Jurnal UNAIR: Peran UN Women dalam Mempengaruhi Kebijakan Pemerintahan India Terkait Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2011-2015.

Khairunnisa Siregar. *Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Pada Masa Federasi Rusia: Sebuah Tinjauan Feminisme Marxis*. Journal Skripsi: Program Studi Rusia: 1006702046

Buku :

Allen W. Wood. 2003. *Elements of The Philosophy of Right*. Cambridge: Cambridge University.

Archer Clive. 2001. *International Organization*. Routledge London.

Clements, Ronald.E. 1991. *The World of Ancient Israel*. Cambridge University Press.

Covelo G.Cevilla, dkk., 1993. *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: Universitas Indonesia.

Hubbs, Joanna. 1993. *Mother Russia: The Feminine Myth in Russia Culture*. USA: Indiana University Press.

Jaggar, Alison (1983). *Feminist politics and human nature*. Totowa, New Jersey: Rowman & Allanheld

Website :

<https://www.amnesty.org/download/.../eur460562005en.pdf>

[http://www.k4healt.org/sites/default/files/CEDAW\\_document.pdf](http://www.k4healt.org/sites/default/files/CEDAW_document.pdf)

<http://www.npr.org/2017/02/16/515642501/russian-president-signs-law-to-decriminalize-domestic-violence>

<https://www.hrw.org/report/2018/10/25/i-could-kill-you-and-no-one-would-stop-me/weak-state-response-domestic-violence#d84764>

Laporan

Amnesty International 14 December 2005. *Violence against Women in the Family is a Human Rights*

Violation.AI Index: EUR 46/056/2005.

ANNA National Center for the Preventing of Violence 2010

CEDAW, Concluding Observations on the Eighth Periodic Report of the Russian Federation, U.N. Doc.CEDAW/CO/RUS/8

*Domestic violence Against Women In The Russian Federation*.62ndsession, October 2015. Examination of the 8thperiodic reportssubmitted by the Russian Federation.

Russian Federation: *Decriminalization Of Domestic Violence*. LL File No. 2017-014703, june 2017.

*Russian Federation Stakeholder Report for the United Nations Universal Periodic Review Submitted by The Advocates for Human Rights.pdf*